MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR REGISTER : 208 K/TUN/1998

TANGGAL PUTUSAN : 25 Mei 1999

MAJELIS : 1. M. Soeharto, SH.
2. Iskandar Kamil, SH.
3. Achmad Kowi, SH.

KAIDAH HUKUM : Bahwa sanggahan/gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Sebelum Badan Peradilan Pajak terbentuk diajukan kepada Pengadilan Negeri (Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 23 ayat (2) dan penjelasannya);

KLASIFIKASI : PERPAJAKAN

DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Khusus No. S1070/WPJ.3035/TG/1994 tanggal 26 Mei 1994, Tergugat telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanggal 30 Mei 1994, Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) tanggal 2 Juni 1994 dan Surat Tagihan Pajak (STP) tanggal 30 Mei 1994 dengan alasan bahwa Penggugat tidak melunasi jumlah pajak dalam SKP, SKPT dan SPT;
- Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan surat teguran No. Teg. 1095/WPJ.06/KP.0208/1994 tanggal 24 Oktober 1994, karena belum dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka Tergugat menerbitkan Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September 1995;
- Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang menerima sebagian keberatan yang semula SKPT PPH Np. 00002/306/92/052/94 tanggal 2 Juni 1994 sebesar Rp. 3.008.559.100,- sehingga hutang pajak Penggugat menjadi Rp. 2.806.130.000,- Surat Keputusan tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 28 Juni 1995 yang berarti sudah lewat waktu 12 bulan sesuai Pasal 26 ayat (1) dan (5) jo. penjelasan Pasal 25 ayat

(3) jo. Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Penggugat telah mengajukan banding ke MPP;

- Bahwa sesuai Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, jika SKP/SKPT/SPT terikat masalah keberatan/banding yang belum diselesaikan yang membawa konsekwensi bahwa SKP/SKPT tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka tidak bisa secara otomatis diterbitkan surat paksa;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

- Bahwa keberatan pada alasan kasasi ad. 2 dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 23 ayat (2) dan penjelasannya, sanggahan gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Sebelum Badan Peradilan Pajak terbentuk diajukan kepada Pengadilan Negeri;

AMAR PUTUSAN MA : M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 November 1997 No. 106/B/1997/PT.TUN.JKT dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juni 1996 No. 159/G.TUN/1995/PTUN-JKT.;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

PUTUSAN
NOMOR : 208 K/TUN/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING, berkedudukan di Jalan Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MANUALA HUTADJULU, SH.**, Kasi Bantuan Hukum Dit. PP Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan surat kuasa khusus substitusi tanggal 5 Maret 1998 No. SKU.059/WPJ.06/KP.02/1998;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan :

PT. NATRA RAYA, diwakili oleh Direktur Utamanya **DONALD C. LOEBACH**, kewarganegaraan Amerika Serikat, beralamat di Jalan Sekolah Duta I No. 29 Pondok Indah Jakarta Selatan, dalam hal ini oleh Kuasanya :

1. **JUSMAN NASIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Admin. Services dan Tax Manager PT. Natra Raya, beralamat di Jalan Mekar Baru I/37 Kampung Baru, Ciputat-Tangerang;
2. **NAZWARDI NAZAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tax Administration PT. Natra Raya, beralamat di Jalan Danau Diatas G II/124 Pejompongan, Jakarta Pusat;
3. **VICTOR G. TUMANSERY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tax Administration PT. Natra Raya, beralamat di Jalan Kelapa Dua Wetan No. 17 Cibubur Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/Ma/106/NR/V/1998 tanggal 1 Mei 1998;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Khusus No. S1070/WPJ.3035/TG/1994 tanggal 26 Mei 1994, Tergugat telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanggal 30 Mei 1994, Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) tanggal 2 Juni 1994 dan Surat Tagihan Pajak (STP) tanggal 30 Mei 1994 dengan rincian seperti yang terurai dalam surat gugatan, oleh karena penilaian Tergugat bahwa Penggugat tidak melunasi Jumlah Pajak dalam SKP, SKPT dan SPT tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan;

bahwa Tergugat kemudian menerbitkan surat teguran No. Teg. 1095/WPJ.06/KP.0208/1994 tanggal 24 Oktober 1994 yang Penggugat terima pada tanggal 3 Januari 1995 dan karena belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Tergugat menerbitkan Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September 1995;

bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang menerima sebagian keberatan yang semula SKPT PPH Np. 00002/306/92/052/94 tanggal 2 Juni 1994 sebesar Rp. 3.008.559.100,- sehingga hutang pajak Penggugat menjadi Rp. 2.806.130.000,- Surat Keputusan tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 28 Juni 1995 yang berarti sudah lewat waktu 12 bulan sesuai Pasal 26 ayat (1) dan (5) jo. penjelasan Pasal 25 ayat (3) jo. Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Penggugat telah mengajukan banding ke MPP;

bahwa sesuai Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, jika SKP/SKPT/SPT terikat masalah keberatan/banding yang belum diselesaikan yang membawa konsekwensi bahwa SKP/SKPT tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka tidak bisa secara otomatis diterbitkan surat paksa;

bahwa dengan demikian surat paksa atas dasar SKP/SKPT yang belum dilunasi adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 karena dapat mengakibatkan Penggugat pailit yang berakibat pada pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan, tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada waktu mengeluarkan keputusan *a quo* telah menyalahgunakan wewenangnya;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Paksa Nomor : Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September 1995 sampai dengan sengketa perpajakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berkekuatan hukum tetap dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Permohonan Penundaan :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September 1995 sampai dengan sengketa perpajakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat oleh karena bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui benar oleh Tergugat;
- bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 15 November 1995, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 5 Juni 1996 No. 159/G.TUN/1995/PTUN-JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah)

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya tanggal 12 November 1997 No. 106/B/1997/PT.TUN.JKT.;

bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 4 Maret 1998 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus substitusi tanggal 5 Maret 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 028/Kas-1998/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 Maret 1998;

bahwa setelah itu oleh Pengugat/Terbanding yang pada tanggal 1 April 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juni 1998, dengan demikian maka jawaban memori/risalah kasasi itu diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, maka jawaban memori/risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan da-

lam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah karena tidak melaksanakannya menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum halaman 36 dan 37 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempergunakan kewenangannya secara maksimal untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan hukum acara dengan baik dan benar;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum acara yang berlaku karena hanya memeriksa berkas perkara, pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan surat-surat lainnya serta langsung mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa memperhatikan adanya ketidakkonsistenan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah fakta di persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dalam memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi banyak menunjukkan hal-hal baru yang dapat mengubah fakta-fakta, namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 2

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 23 ayat (2) dan penjelasannya, sanggahan/gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Sebelum Badan Peradilan Pajak terbentuk diajukan kepada Pengadilan Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 2 tersebut di atas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 November 1997 No. 106/B/1997/PT.TUN.JKT. yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juni 1996 No. 159/G.TUN/1995/PTUN.JKT. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 November 1997 No. 106/B/1997/PT.TUN.JKT. dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juni 1996 No. 159/G.TUN/1995/PTUN.JKT.;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 November 1999 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, ISKANDAR KAMIL, SH. dan ACHMAD KOWI AS., SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh ISKANDAR KAMIL, SH. dan ACHMAD KOWI AS., SH. Hakim-hakim Anggota tersebut, serta ZAINAL AGUS, SH. Pantiera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ISKANDAR KAMIL, SH.

ttd.

ACHMAD KOWI AS., SH.

K E T U A,

ttd.

H. SOEHARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ZAINAL AGUS

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp.	2.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Adminstrasi Kasasi.....	Rp.	<u>97.000,-</u>
Jumlah	Rp.	100.000,-

PUTUSAN

NOMOR : 106/B/1997/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. NATRA RAYA, berkedudukan di Jalan Cilandak KKO Cilandak Commercial Estate Building 105 W Jakarta Selatan, dalam hal ini dwakili oleh :

1. DONALD C. LOEBACH, kewarganegaraan Amerika Serikat, pekerjaan Direktur Utama PT. Natra Raya, alamat Jalan Sekolah Duta I No. 29 Pondok Indah, Jakarta Selatan;
2. DENNIS F. DOMINICK, kewarganegaraan Amerika Serikat, pekerjaan Direktur Utama PT. Natra Raya, alamat Jalan Sekolah Duta Raya TB-39 Pondok Indah, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. JUSMAN NASIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Admin. Services dan Tax Manager PT. Natra Raya, beralamat di Jalan Mekar Baru I/37 Kampung Baru, Ciputat-Tangerang;
2. NAZWARDI NAZAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tax Administration PT. Natra Raya, beralamat di Jalan Danau Diatas G II/124 Pejompongan, Jakarta Pusat;
3. VICTOR G. TUMANSERY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tax Administration PT. Natra Raya, beralamat di Jalan Kelapa Dua Wetan No. 17 Cibubur Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 1997 No. 02/DIR-SK-159/NR/VI/1997, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING,
berkedudukan di Jalan Makam Pahlawan Kalibata
Jakarta Selatan,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TJIP ISMAIL, SH. Jabatan Kasubdit. Dokumentasi Peraturan Pajak dan Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan;
2. IDAWATI, SH. Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan;
3. SUHARSYAH SYAHBOEDIN, SH. Jabatan Kepala Subseksi Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan;
4. HADI KUSNO, SH. Jabatan Kepala Seksi Panagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 1996 Nomor SKU-059/WPJ.06/KP.02/1996, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 6 Oktober 1997 Nomor : 106/B/1997/PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa serta mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juni 1995 Nomor : 159/G.TUN/1995/PTUN-JKT.;
3. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

4. Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun keterangan-keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara;
5. Permohonan Pemeriksaan Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 17 Juni 1996;
6. Akta Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding Nomor : 053/BD/1996/PTUN.JKT. tanggal 17 Juni 1996;
7. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada : JUSMAN NASIR DKK (Kuasa Penggugat/Terbanding) tanggal 19 Juni 1996;
8. Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 1 Mei 1997;
9. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding (PT. NATRA RAYA) tanggal 12 Mei 1997;
10. Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tanggal 10 Juli 1997;
11. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (Tergugat/Pembanding) tanggal 15 Juli 1997;
12. Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 26 Agustus 1997 masing-masing kepada :
 - Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (Tergugat/Pembanding);
 - PT. NATRA RAYA (Penggugat/Terbanding)

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara dalam perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juni 1996 Nomor : 159/G.TUN/1995/PTUN-JKT. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari kuasa Tergugat/Pembanding diajukan tanggal 17 Juni 1996, diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juli 1997, diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 15 Juli 1997;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat/membaca dan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 26 Agustus 1997;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding tanggal 17 Juni 1996 masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah fakta-fakta di persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara, maupun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juni 1996 Nomor : 159/G.TUN/1995/PTUN-JKT. serta surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan mengambil sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juni 1996 Nomor : 159/G.TUN/1995/PTUN-JKT. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juni 1996 Nomor : 159/G.TUN/1995/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara banding ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU, tanggal 12 November 1997 oleh kami MARCUS LANDE, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, AMARULLAH SALIM, SH. dan NY. AISYAH, SH. Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh MULJADI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. AMARULLAH SALIM, SH.

ttd.

2. NY. AISYAH, SH.

K E T U A,

ttd.

MARCUS LANDE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M U L J A D I, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp.	1.000,-
2. Administrasi Kepaniteraan	Rp.	20.000,-
3. Fotocopy berkas	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	1.000,-
5. Meterai	Rp.	2.000,-
6. Leges	Rp.	2.000,-
7. Pengetikan putusan	Rp.	15.000,-
8. Pengiriman berkas	Rp.	5.000,-
9. Pemberkasan	Rp.	<u>17.500,-</u>
Jumlah	Rp.	70.000,-

(tujuh puluh ribu rupiah)

PUTUSAN
NOMOR : 159/G.TUN/1995/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Angkasa I/24 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, telah menjatuhkan putusannya dalam sengketa antara :

PT. NATRA RAYA, berkedudukan di Jalan Cilandak KKO Cilandak Commercial Estate Building 105 W Jakarta Selatan, dalam hal ini dwakili oleh DONALD C. LOE-BACH, kewarganegaraan Amerika Serikat, pekerjaan Direktur Utama PT. Natra Raya, alamat Jalan Sekolah Duta I No. 29 Pondok Indah, Jakarta Selatan; CHRIS W. GREEN, warganegara Inggris, pekerjaan Wakil Direktur Utama PT. NATRA RAYA, alamat Jl. Raya Houssing Blok C No. 1 Pondok Gede Jatiwaringi, dan JOSEPH DAVID RICE, warganegara Amerika Serikat, pekerjaan Direktur PT. NATRA RAYA, alamat Jl. Taman Alam PL-3 Pondok Indah Jakarta Selatan, dalam hal ini secara bersama-sama bertindak atas nama PT. NATRA RAYA berdasarkan Pasal 10 Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris : KARTINI MULYADI, SH. No. 19 tanggal 7 Desember 1982 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Agustus 1983 No. 65 terakhir dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RESOLUSI No. 132 tanggal 22 Februari 1995 dibuat di hadapan KOESBIONO SARMAN HADI, SH.MH. yang selanjutnya disebut selaku PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING, Berkedudukan di Jalan Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal Nomor : 159/PEN-MH/PTUN.JKT/1995 tanggal 21 Desember 1995 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 159/PEN-HS/PTUN-JKT/1995 tanggal 21 Desember 1995 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut;
3. Berkas perkara serta Surat-surat Bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa didalam persidangan;
4. Mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak didalam persidangan;
5. Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan sengketa tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengans surat gugatannya tertanggal 18 Desember 1995 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juni 1996 Nomor : 159/G.TUN/1995/PTUN-JKT. dan telah dianggap sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Januari 1996, dan surat gugatan tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Alasan Guggatan : Atas Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208/1995 tanggal 5 September 1995 dan baru diberikan kepada Penggugat pada tanggal 15 November 1995 (bukti P-4) sehubungan dengan tidak dilunasinya SKP, SKPT dan STP yang akan diuraikan dibawah ini. Penerbitan Surat Paksa tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986;

Menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara maka jangka waktu pengajuan gugatan adalah sembilan puluh (90) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Penggugat menerima Surat Paksa tersebut pada tanggal

15 November 1995, sedangkan tanggal penerbitannya adalah tanggal 5 September 1995;

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

Berpedoman semata-mata pada laporan hasil pemeriksaan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Khusus No. S1070/WPJ.3035/TG/ 1994 tanggal 26 Mei 1994, Tergugat telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanggal 30 Mei 1994, Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) tanggal 2 Juni 1994 dan Surat Tagihan Pajak (STP) tanggal 30 Mei 1994 dengan perincian sebagai berikut :

1. SKPT PPh Badan No. 0002/306/92/052/94	Rp. 3.008.558.100,-
2. SKP PPN No. 00164/207/92/052/94	Rp. 162.456.961,-
3. SPT PPN No. 01539/103/92/052/94	Rp. 18.767.070,-
Jumlah	Rp. 3.189.782.131,-

Oleh karena menurut penilaian Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Penggugat tidak melunasi jumlah Pajak dalam SKP, SKPT dan STP tersebut di atas sampai dengan waktu yang telah ditentukan, Tergugat menerbitkan Surat Tegoran No. Teg-1095/WPJ.06/KP.0208/1994 tanggal 24 Oktober 1994 (bukti P-6) yang Penggugat terima pada tanggal 3 Januari 1995 dan karena belum dilunasi juga sampai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran, maka Tergugat menerbitkan Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September 1995 yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 November 1995;

Sebelum diterbitkannya Surat Paksa di atas Penggugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b, c dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 Penggugat telah mengajukan Surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan telah dijawab oleh Direktur Jenderal Pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Surat Keberatan No. 07/SKPT-Ps.25/DES/NR/MI/94 tanggal 27 Juni 1994 (bukti P-7) dan Penjelasan Tambahan Keberatan No. 01/SKPT-PS25/D/NR/II/95 tanggal 10 Januari 1995 (bukti P-8) atas SKPT PPh Badan No. 00002/306/92/052/94 tanggal 2 Juni 1994 sebesar Rp. 3.008.558.100,- (bukti P-9). Keberatan diterima se-

bagian dengan Surat Keputusan No. KEP 1355/PJ.45/1995 tanggal 26 Juni 1995 sehingga hutang Pajak Penggugat menurut Tergugat menjadi sebesar Rp. 2.806.130.000,- (bukti P-10). Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal 28 Juni 1995, yang berarti sudah lewat jangka waktu 12 bulan (daluarsa). Atas Surat Keputusan tersebut Penggugat telah mengajukan Banding ke Majelis Pertimbangan Pajak dengan Surat Nomor : 01/SKPT-PS.25/DES/NR/VII/95 tanggal 27 Juli 1995 (bukti P-11);

Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) dan (5) jo. Penjelasan Pasal 25 ayat (4) alinea ke 3 jo Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dinyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan wajib pajak tidak menerima surat balasan dari Direktur Jenderal Pajak atas Surat Keberatan yang diajukan wajib pajak maka Keberatan dianggap diterima.

Pengertian masalah lewat waktu/daluarsa ini telah diputuskan pula oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) melalui Surat Keputusan No. Kep. 716/MPP/1991 tanggal 25 Juli 1991 (bukti P-12);
09/PPh.BD/87

2. Surat Keberatan No. 06/PPN.DIS/VIII/NR/94 tanggal 30 Agustus 1994 (bukti P-13) atas SKP PPN No. 00164/107/92/052/94 tanggal 30 Mei 1994 (bukti P-14), ternyata ditolak dengan Surat Keputusan No. Kep-324/PJ.55/1995 tanggal 2 Agustus 1995 (bukti P-15). Atas Surat Keputusan tersebut Penggugat telah mengajukan Banding ke Majelis Pertimbangan Pajak dengan surat No. 03/SKP-PPN/NR/IX/95 tanggal 8 September 1995 (bukti P-16);

Dengan memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c, dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 jo. Pasal II Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 maka Penggugat telah menghitung jumlah pajak yang seharusnya terhutang yang dikompensasikan dengan lebih bayar Uang Muka Pajak Badan berupa PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh 25 tahun pajak 1992; dan kemudian mengajukan Keberatan terhadap jumlah pajak yang tidak terutang;

Adanya kata "dapat" pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jelas mengandung makna tidak imperatif untuk diterbitkan Surat Paksa. Disini harus diperhatikan kemungkinan masalah yang timbul yang ada kaitannya dengan apa yang dinamakan "*in kracht van gesijsde*" (mempunyai kekuatan hukum yang tetap);

Sepanjang atas SKP/SKPT/STP tidak tersangkut masalah keberatan/banding oleh Wajib Pajak dengan sendirinya Surat Paksa bisa diterbitkan andaikan Wajib Pajak tidak membayar pajak terhutang yang dihitung dan diakuinya pada waktunya. Namun sebaliknya andaikata SKP/SKPT/STP terikat masalah keberatan/banding oleh Wajib Pajak, maka tidak bisa secara Otomatis diterbitkan Surat Paksa.

Justru kata "dapat" dalam Pasal 23 ini sengaja dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden RI untuk tidak diberlakukan secara generalisir dalam menerbitkan Surat Paksa atas SKP/SKPT/STP yang belum lunas pembayarannya;

Dengan sendirinya Tergugat tidak boleh menerbitkan Surat Paksa termasuk mengingat :

1. Berlaku Sistem *Self Assesment* (vide Pasal 12 jo Pasal 13 ayat (6) jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 jo. Pasal II Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;
2. SKP/SKPT itu belum mempunyai ketentuan hukum yang tetap (belum *in kracht van gewijsde*), dan
3. dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dimuat perkataan "dapat ditagih dengan Surat Paksa";
4. dalam Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tidak ada kata-kata yang menyebutkan, bahwa Hutang Pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak

Jadi berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tergugat seharusnya tidak boleh menerbitkan Surat Paksa apabila atas SKP/SKPT masih terkait dengan keberatan yang belum diselesaikan yang membawa konsekwensi bahwa SKP/SKPT tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti juga terdapat dalam tulisan Abdul Hadi Pulungan, SH. yang dimuat dalam surat harian "Kompas" tanggal 29 September 1994 (bukti P-17);

Bahwa dengan diterbitkannya keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang diantaranya ditolak dan disetujui sebagian dan atas keputusan tersebut Penggugat telah mengajukan Banding ke Majelis Pertimbangan Pajak dengan Surat No. 03/SKP/PPN/NR/IX/95 tanggal 8 September 1995 atas Surat Keputusan Dirjen Pajak No. SKP PPN No. 00164/207/92.052/94 tanggal 30 Mei 1994 dan Banding ke Majelis Pertimbangan Pajak No. KEP-1355/PJ.45/1995 tanggal 26 Juni 1995 mengenai SKP PPh Badan No. 00002/306/92/052/94 tanggal 2 Juni 1994; sehingga menjadi jelas bahwa Surat

Paksa yang terdiri dari SKP/SKPT yang masih dalam proses administratif belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila ditagih dengan Surat Paksa merugikan Penggugat;

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa penerbitan Surat Paksa atas Dasar SKP/SKPT yang belum dilunasi itu adalah bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang dipaparkan di atas ini serta Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Surat Tagihan Pajak (STP) :

Terhadap STP tersebut tidak dapat diajukan keberatan maupun banding ke Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) atas dasar Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983;

Dalam prakteknya, berdasarkan apa yang telah terjadi, terhadap Surat Tagihan Pajak oleh Dirjen Pajak disampaikan agar diajukan permohonan peninjauan kembali atas dasar Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Akan tetapi baik dalam pasalnya maupun dalam memori penjelasan tidak ada penegasan tentang upaya hukum oleh Wajib Pajak berupa pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut;

Dengan memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983, maka Penggugat telah menghitung jumlah pajak yang seharusnya terhutang dan selanjutnya mengajukan Surat Permohonan Peninjauan Kembali kepada Direktur Jenderal Pajak;

Surat Permohonan Peninjauan Kembali No. 02/STP PPN/DES/92/VIII/NR/94 tanggal 22 Agustus 1994 (bukti P-18) atas STP PPN No. 01539/107/92/052/94 tanggal 30 Mei 1994 (bukti P-19), ditolak dengan Surat No. Kep-325/PJ.55/1995 tanggal 2 Agustus 1995 (bukti P-20). Atas Surat Keputusan tersebut Penggugat secara khusus telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat No. 02/PTUN92D/NR/X/95 tanggal 19 Oktober 1995 (bukti P-21) karena atas surat keputusan tersebut tidak ada upaya hukum lainnya;

Adanya kata "dapat" pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jelas mengandung makna tidak imperatif untuk diterbitkan Surat Paksa. Disini harus diperhatikan kemungkinan masalah yang timbul yang ada kaitannya dengan apa yang dinamakan "*in kracht van gewijsde*" (mempunyai kekuatan hukum yang tetap). Sepanjang atas SKP/SKPT/STP tidak tersangkut masalah keberatan/ banding oleh Wajib Pajak dengan sendirinya Surat Paksa bisa diterbitkan andaikan Wajib Pajak tidak membayar pajak terhutang yang dihitung dan diakuninya pada waktunya. Namun sebaliknya andaikata SKP/ SKPT/STP

terikat masalah keberatan/banding oleh Wajib Pajak, maka tidak bisa secara Otomatis diterbitkan Surat Paksa.

Justru kata "dapat" dalam Pasal 23 ini sengaja dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden RI untuk tidak diberlakukan secara generalisir dalam menerbitkan Surat Paksa atas SKP/SKPT/STP yang belum lunas pembayarannya;

Menjadi jelas bahwa Surat Paksa yang terdiri dari STP yang telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan telah ditolak dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-325/PJ.55/1995 tanggal 2 Agustus 1995 karena tidak ada upaya hukum lainnya telah kami ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat No. 02/PTUN92D/NR/X/95 tanggal 19 Oktober 1995 yang sampai saat ini masih berada dalam proses pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga apabila ditagih dengan Surat Paksa jelas merugikan Penggugat;

Maka Tergugat tidak perlu menerbitkan Surat Paksa termaksud, mengingat :

1. Berlaku Sistem *Self Assesment* (vide Pasal 12 jo Pasal 13 ayat (6) jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 jo. Pasal II Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;
2. SKP tersebut belum mempunyai ketentuan hukum yang tetap (belum *in kracht van gewijsde*), dan
3. dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dimuat perkataan "dapat ditagih dengan Surat Paksa";
4. dalam Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tidak ada kata-kata yang menyebutkan, bahwa Hutang Pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak

Jadi berdasar Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tergugat seharusnya tidak boleh menerbitkan Surat Paksa apabila Penggugat telah menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang dan kemudian mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Dirjen Pajak yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali mengingat STP tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tidak dapat diterbitkan Surat Paksa itu juga terdapat dalam tulisan Abdul Hadi Pulungan, SH. yang dimuat dalam surat kabar "Kompas" tanggal 29 September 1994 (bukti P-17)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Paksa atas dasar STP yang belum dilunasi itu adalah bertentangan dengan

ketentuan yang termaktub dalam Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang dipaparkan ini serta Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

SURAT PAKSA

Bahwa Surat Paksa berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ini berarti kekuatan hukum sama dengan putusan Pengadilan/Putusan Hakim, tetapi ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan *Grosse Akte* pada Akte Hipotik atau pada pengakuan hutang di depan Notaris (Pasal 224 HIR), karena jumlah hutang dalam Surat Paksa yang terdiri dari Surat Ketetapan Pajak (SKP, Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dibayar oleh Penggugat sebagai Wajib Pajak jumlahnya belum pasti;

Meskipun betapa besarnya peran pajak dalam pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat dan diperlukan kesadaran tinggi dari rakyat ataupun Badan-badan Usaha sebagai Wajib Pajak namun demikian azas penarikan pajak yang dianut adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri berapa besar pajak yang seharusnya diserahkan kepada negara. Dengan demikian Wajib Pajak tidak merasa keberatan terhadap besarnya pajak sesuai dengan tingkat pendapatan masing-masing Wajib Pajak;

Apabila pajak terhutang kepada negara benar-benar dilaksanakan dengan secara Paksa kepada Wajib Pajak sebagaimana sanksi yang termuat dalam Surat Paksa tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin timbul dan ditariknya pajak secara paksa dapat mengakibatkan dampak negatif antara lain terganggunya kegiatan perusahaan;

Bahwa berdasarkan informasi dari Majelis Pertimbangan Pajak pengajuan Banding ke Majelis Pertimbangan Pajak atas keberatan SKP/SKPT yang ditolak oleh Dirjen Pajak hampir 90% dikabulkan oleh Majelis Pertimbangan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa bukan bertujuan mengamankan penerimaan negara tetapi hanya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Sehingga Surat Paksa yang dikeluarkan dengan sewenang-wenang yang merugikan Penguat dan dapat mengakibatkan Penggugat pailit yang berkibat pada pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran yang pada akhirnya akan merugikan negara. Kerugian Penggugat dalam hal ini PT. Natra Raya dapat mengakibatkan penarikan modal oleh penanam modal asing (*Caterpillar*), sedangkan pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menarik Penanam Modal Asing ke Indonesia;

Penggugat merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Paksa No. Print-315/WPJ.06/KP.0208/1995 tanggal 5 September 1995 yang baru diterima Penggugat pada tanggal 15 November 1995 oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah kami uraikan di atas;

Menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah :

- a. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Dapat kami tambahkan bahwa gugatan atas Surat Paksa telah diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehubungan dengan sengketa antara Fadchi Zubaidi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta dengan sengketa antara PT. Kurnia Sirop Manis dengan Kepala Pelayanan Pajak Medan Utara (bukti P-23), serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Linggarjati Makmur Cirebon dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Cirebon (bukti P-24) sebagaimana Majelis Hakim dapat membaca berkasnya;

Berdasarkan uraian dan kebenaran pembuktian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Permohonan Penundaan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Paksa No. Print-315/WPJ.06/KP.0208/1995 tanggal 5 September 1995 yang diterima Penggugat tanggal 15 November 1995 sampai dengan sengketa perpajakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Paksa No. Print-315/WPJ.06/KP.0208/1995 tanggal 5 September 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat oleh karena bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat diwakili kuasanya bernama : SUHARSYAH SYAHBOEDI, SH. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-04/WPJ.06/KP.02/1996 tertanggal 8 Januari 1996, oleh Kuasa Tergugat tersebut pada tanggal 8 Februari 1996 telah mengajukan tanggapan/jawabannya terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui benar oleh Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Paksaan Nomor : Print 315/WPJ.06/KP.0208/1995 yang diterbitkan Tergugat tanggal 15 November 1995;
3. Bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 ditegaskan bahwa :

Ayat (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "Atas Keadilan" serta memuat nama penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah untuk membayar;

Ayat (2) Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sama seperti *grosse* putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada Hakim atasan;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa :

Sifat Surat Paksa adalah suatu *executoriale titel* yang mempunyai kekuatan yang sama seperti *grosse* Keputusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan. Oleh karena itu Surat Paksa memakai kepala "Atas Nama Keadilan".

Dengan demikian jelaslah bahwa Surat Paksa mempunyai sifat yang khusus yang merupakan "*Parate Eksekusi*" sehingga tidak dapat disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) lainnya;

4. Bahwa sanggahan terhadap pelaksanaan Surat Paksa diatur secara khusus pula dalam beberapa Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 serta Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1994 dimana ditentukan bahwa sanggahan dan atau gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri sebagaimana yang dinyatakan dalam Ketentuan Undang-undang tersebut sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959, Pasal 7 ayat (3) :

"Sanggahan terhadap pelaksanaan juga dari pihak ketiga, ... diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri"

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Pasal 23 ayat (2) :

"Sanggahan dan/atau gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita dan/atau lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak"

Selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa :

Sebelum Badan Peradilan Pajak dibentuk, maka sanggahan/gugatan Penanggungan Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa diajukan kepada "Pengadilan Negeri setempat"

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan terhadap Surat Paksa seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri, oleh sebab itu Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus dalam Eksepsi dengan diktum yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa mengenai Surat Paksa ini, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di dalam Eksepsi di atas mohon telah termasuk pula dalam Pokok Perkara ini dan dengan ini pula Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas benar oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam alasan gugatannya yang menyatakan penerbitan Surat Paksa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah tidak benar dan tidak berdasar dan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan alasan-alasannya. Oleh

karena itu Tergugat menolak dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;

3. Bahwa Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 justru merupakan dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Paksa, yang berbunyi sebagai berikut ;

Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Penetapan Pajak Tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

Bahwa disebabkan SKP PPN No. 00164/207/92/052/94, SKPT PPh Badan No. 00002/306/92/052/94 dan STP PPN No. 01539/103/92/052/94 telah jatuh tempo pembayaran dan Penggugat belum juga melunasinya maka berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tergugat mengeluarkan Surat Paksa;

Bahwa dengan demikian jelaslah Penerbitan Surat Paksa yang Tergugat lakukan sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983;

4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 gugatannya yang menyatakan kata "dapat" pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mengandung makna tidak imperatif adalah tidak benar;

Bahwa kata "dapat" ditagih maksudnya Pembuat Undang-undang adalah bahwa Dirjen Pajak dapat menggunakan wewenangnya atau menunda menggunakan wewenangnya untuk menagih dengan Surat Paksa;

Menunda menagih dengan Surat Paksa, misalnya dalam hal Dirjen Pajak menyetujui permohonan pencicilan atau penundaan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak;

Bahwa pengeritan kata "dapat" secara limitatif telah dinyatakan dalam penjelasan Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 sehingga tidak mungkin ada pengertian yang lain;

Lebih tegas lagi tentang penagihan dalam hubungan dengan keberatan dinyatakan dalam penjelasan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagai berikut :

Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan Pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan surat keberatan tidak menghalangi tindakan penagihan. Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak dengan dalil mengajukan keberatan, untuk tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan negara;

Bahwa penagihan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 25 ayat (6) Tahun 1983 adalah penagihan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 yaitu penagihan dengan Surat Paksa, yang merupakan satu-satunya penagihan yang dikenal dalam Undang-undang perpajakan;

5. Bahwa pendapat Penggugat halaman 3 butir 1 yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat No. KEP-1355/PJ.45/1995 tanggal 26 Juni 1995 sudah lewat jangka waktu 12 bulan/daluarsa adalah tidak benar dan tidak berdasar bahwa Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak :

No. Kep. 716/MPP/1991 tanggal 25 Juli 1991 ditujukan terha-

dap kasus yang berbeda dengan perkara *a quo*;

Bahwa perbedaan tersebut dapat dilihat pada konsideran "menimbang" dalam Surat Keputusan MPP di atas mencantumkan sebagai berikut :

" surat keberatan diterima tanggal 15 April 1986 sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut diterbitkan pada tanggal 15 April 1987;"

Sedangkan atas Surat Keberatan Penggugat No. 07/SKPT-Ps25/DES/NR/VI/94 yang diterima tanggal 27 Juni 1994 dalam perkara *a quo* telah dijawab dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1355/PJ.45/1995 yang diterbitkan tanggal 26 Juni 1995;

Bahwa oleh karena itu Tergugat kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat pada halaman 3 butir 1 yang menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1335/PJ.45/1995 tanggal 26 Juni 1995 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPT PPh Badan No. 00002/306/92/052/94 sudah daluwarsa, karena Keputusan tersebut telah Tergugat Keluarkan masih dalam tenggang waktu 12 bulan;

6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3, 4 dan 5 yang menyatakan SKP, SKPT dan STP yang dalam proses keberatan atau upaya Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 belum *in kracch van gewijsde* dan bertentangan dengan sistem *Self Assessment* adalah tidak benar dan merupakan alasan yang dicari-cari Penggugat, dan karenanya Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut;

Bahwa dari sudut hukum Tata Usaha Negara hal tersebut juga bertentangan dengan azas hukum yang ada, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Indroharto, SH. sebagai berikut :

"Bahwa dalam suasana hukum TUN itu berlaku suatu azas bahwa keputusan TUN selalu dianggap sah menurut hukum dan karenanya dapat seketika dilaksanakan, selama tidak dibatalkan oleh instansi pengawas administratif atau badan perdilan yang berwenang untuk itu" (Indroharto, SH. Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku ke-II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1993 halaman 52);

Bahwa perlu Tergugat jelaskan sistem *Self Assessment* yang dianut Undang-undang Perpajakan Indonesia adalah suatu sistem dimana terhadap Wajib Pajak adalah suatu sistem dimana terhadap Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Atas kepercayaan tersebut pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut (Vide Memori Penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994);

Bahwa salah satu alat pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa (vide Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994);

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa atas SKP, SKPT, STP seketika dapat dilaksanakan penagihannya dengan Surat Paksa bila telah jatuh tempo pembayarannya;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang dikemukakan Penggugat (halaman 6) yang menyatakan bahwa Surat Paksa disamakan dengan *Grosse* akte akan tetapi pelaksanaannya tidak sama dengan Akta Hipotek atau pengakuan hutang di depan Notaris (Pasal 224 HIR);
8. Bahwa tulisan Abdul Hadi Pulungan, SH. yang dimuat dalam harian Kompas (bukti P-17) seperti yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya tidak dapat diajukan sebagai acuan dalam memeriksa perkara *a quo* karena tulisan Abdul Hadi Pulungan, SH. tersebut hanyalah merupakan interpretasi pribadi terhadap ketentuan Undang-undang;
9. Bahwa Putusan PTUN maupun PTTUN yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya tidak dapat diajukan sebagai acuan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena putusan PTUN dan PTTUN tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan bukan merupakan interpretasi Tergugat melainkan pengertian yang jelas-jelas diatur dalam Undang-undang;
11. Bahwa semua yang Tergugat lakukan sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan perkara *a quo* demikian pula dalam mengeluarkan Surat Paksa No. Print.315/WPJ.06/KP.0208/1995 tanggal 5 September 1995 didasarkan pada wewenang yang ada sesuai dan semata-mata hanya untuk menjalankan amanat Undang-undang. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, kami Kuasa Hukum Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus dengan diktum :

DALAM EKSEPSI : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan pada tanggal 12 Maret 1996;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, oleh Tergugat telah mengajukan Dupliknya di persidangan pada tanggal 20 Maret 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya oleh Penggugat telah mengajukan/menyerahkan bukti-bukti tertulisnya berupa fotocopy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan bukti-bukti tersebut diberi tanda dari P-1 sampai dengan P-30, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

- P-1 Akta Notaris Kartini Mulyadi, SH. No. 19 tanggal 7 Desember 1982 (sesuai asli);
- P-2 Tambahan Berita Negara RI No. 65 tanggal 16 Agustus 1983;
- P-3 Akta Notaris Koesbiono Sarmanhadi, SH.,MH. No. 132 tanggal 22 Februari 1995;
- P-4 Surat Paksa No. Print-315/WPJ.06/KP.0208/1995 tanggal 5 September 1995;
- P-5 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. S-1070/WPJ.06.3035/TG/1994 tanggal 26 Mei 1994;
- P-6 Surat Tegoran No. Teg-1095/WPJ.06.KP.0208/1994 tanggal 24 Oktober 1994;
- P-7 Surat Keberatan No. 07/SKPT-Ps.25/DES/NR/VI/94 tanggal 27 Juni 1994, tanda terima asli;
- P-8 Penjelasan Tambahan No. 01/SKPT-Ps.25/D/NR/II/95 tanggal 10 Januari 1995;
- P-9 SKPT PPh Badan No. 00002/306/92/052/94 tanggal 2 Juni 1994;
- P-10 Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-1355/PJ.45/1995 tanggal 26 Juni 1995;
- P-11 Surat Permohonan Banding No. 01/SKPT-Ps.25/DES/NR/VIII/95 tanggal 27 Juli 1995, tanda terima asli;
- P-12 Surat MPP No. Kep 716/MPP/1991 tanggal 25 Juli 1991;
09/PPh/BD/87
(copy dari copy)
- P-13 Surat Keberatan No. 06/PPN/DIS/VII/NR/94 tanggal 30 Agustus 1994 (copy);
- P-14 SKP PPN No. 00164/207/92/052/94 tanggal 30 Mei 1994;
- P-15 Surat Keputusan Keberatan No. Kep-324/PJ.55/1995 tanggal 2 Agustus 1995;

- P-16 Surat Permohonan Banding No. 03/SKP-PPN/NR/IX/95 tanggal 8 September 1995;
- P-17 Bina Pajak Harian Kompas, halaman 12, tanggal 29 September 1994, Abdul Hadi Pulungan, SH.;
- P-18 Surat Permohonan Peninjauan Kembali No. 02/STPPPN/DES92/VIII/94 tanggal 22 Agustus 1994, tanda terima asli;
- P-19 STP PPN No. 01539/107/92/052/94 tanggal 30 Mei 1994;
- P-20 Surat Keputusan Permohonan Peninjauan Kembali No. Kep-325/PJ.55/1955 tanggal 2 Agustus 1995;
- P-21 Surat Gugatan No. 02/PTUN92D/NR/X/95 tanggal 19 Oktober 1995, tanda terima asli;
- P-22 Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 132/B/1994/PT.TUN.JKT.;
- P-23 Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 29 Desember 1993;
- P-24 Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung tanggal 1 Agustus 1995;
- P-25 Bukti Pindahbukuan No. PBK.2392/XII/WPJ.06/KP.0209/1995 tanggal 21 Desember 1995;
- P-26 SKP PPh Badan Tahun 1988 No. 00010/206/88/052/92 tanggal 20 Oktober 1992;
- P-27 Surat Keberatan Putusan Perkara No. W.7.PTUN.JKT.PRK.095.229.1996 tanggal 22 Maret 1996;
- P-28 Masalah diadakannya seminar dengan judul "Usul-usul Perubahan Ketentuan Undang-undang Perpajakan Yang Berlaku" (Bagian Kesimpulan) tanggal 20 Maret 1996 (*Bussiness News*);
- P-29 Berita Acara Perkara No. 118/G/1994/Pjk/PTUN-JKT tanggal 29 November 1995;
- P-30 Putusan No. 095/G/1995/PJK/TUN-JKT tanggal 5 Maret 1996 antara PT. Natra Raya melawan Kepala Kantor Pelayanan Modal Asing;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan Saksi Ahli bernama : Drs. THABRANY, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Konsultan Pajak, alamat : Jl. Cemara Gondangdia Menteng Jakarta 10350, dimana saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Sistem Perpajakan di Indonesia berdasarkan Azas menghitung sendiri (*Self Assessment*);
- Bahwa setiap Pembelian barang dikenakan PPN oleh Penjual (Pemungut Pajak) dan menyetor sendiri di Kantor Pajak;
- Bahwa setiap Wajib Pajak setiap saat dapat diperiksa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1994 jo Undang-undang No. 6, 7 dan No. 8 Tahun 1983 bilamana berdasarkan laporan pihak pelapor berdasarkan ditemukannya "Bukti" sebagaimana menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;
- Bahwa apabila adanya perubahan nilai terhadap Surat Paksa, maka dengan sendirinya Surat Paksa tersebut batal demi hukum dan sehingga tidak ada lagi relevansinya;
- Bahwa surat keberatan yang dimohon Wajib Pajak dihitung mulai tanggal jangka waktunya 12 bulan sejak diterima adanya tanda bukti penerimaan wajib pajak tidak menerima surat balasan dari Direktorat Jenderal Pajak Otomatis Keberatan Wajib Pajak diterima;
- Bahwa penyampaian Surat Paksa dalam prakteknya penyampaian di tempat Kantor Wajib Pajak, dan akan dinyatakan diterima walaupun yang menerima Pegawai Kantor yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pihak Tergugat telah mengajukan/menyerahkan di persidangan bukti-bukti tertulisnya berupa fotocopy bermeterai cukup yang diberi tanda dari T-1 sampai dengan T-16 dan telah disesuaikan dengan surat aslinya sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

- T-1 Surat Paksa No. Print-315/WPJ.06/KP.0208/1995 tanggal 15 November 1995 (sesuai aslinya);
- T-2 SKP PPN Nomor 00164/207/92/052/94 tanggal 30 Juni 1994 (sesuai aslinya);
- T-3 SKPT PPh Nomor 00002/306/92/052/94 tanggal 2 Juli 1994 (sesuai aslinya);
- T-4 SKP PPN Nomor 01539/103/92/052/94 tanggal 30 Juni 1994 (sesuai aslinya);
- T-5 Surat MPP No. Kep 716/MPP/1991 tanggal 25 Juli 1991;
09/PPH/BD/87
(copy dari copy)
- T-6 Surat Permohonan Keberatan Nomor : 07/SKPT-Ps.25/DES/NR/VI/94 tanggal 27 Juni 1994 (sesuai aslinya);

- T-7 Keputusan Dirjen Pajak Nomor : 1355/PJ.45/1995 tanggal 26 Juni 1995 (sesuai aslinya);
- T-8 Buku : Usaha Memahami Undang-undang PTUN Karangan : Indroharto, SH. Penerbit : Pustaka Sinar Harapan Halaman : 52 Buku II (sesuai aslinya);
- T-9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 (sesuai aslinya);
- T-10 Juklak Mahkamah Agung RI Nomor : 051/Td.TUN/III/1992 (sesuai aslinya);
- T-11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 (sesuai aslinya);
- T-12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 608/KMK.04/1994 (sesuai aslinya);
- T-13 SKP PPh Nomor : 00010/206/88/052/92 tanggal 21 Desember 1995 (sesuai aslinya);
- T-14 Bukti Pemindahbukuan No. Pbk. 2392/XII/WPJ.06/KP.0209/1995 tanggal 21 Desember 1995 (sesuai aslinya);
- T-15 Laporan Pelaksanaan Surat Paksa No. Lap-238/WPJ.06/KP.0208/95 tanggal 15 November 1995 (sesuai aslinya);
- T-16 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.45/1993 tanggal 9 Agustus 1993 (copy dari copy);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi ahlinya di persidangan bernama : Ir. SERIRAMA BUTAR-BUTAR, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Direktorat Penagihan Direktorat Pemeriksaan Pajak, agama Kristen, dimana dalam kesaksian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah menggunakan sistem *self assessment* yaitu setiap wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri pajak terhutangnya, sistem tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;
- Bahwa dalam pelaksanaan sistem *self assessment*, Pemerintah mempunyai wewenang untuk memeriksa, menguji, meneliti terhadap jumlah pajak dari wajib pajak, dan apabila ditemukan adanya jumlah pajak kurang pada waktu dilakukan pemeriksaan maka Direktorat Pajak akan mengeluarkan sanksi berupa SKPT, selanjutnya terhadap SKPT/SKP menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor

6 Tahun 1983, dalam jangka waktu 12 bulan Direktorat Pajak memberikan Keputusan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak;

- Bahwa bilamana SKPT/SKP dan STP tidak dilunasi oleh Wajib Pajak Direktorat Pajak dapat menerbitkan Surat Paksa sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan cara menyampaikan Surat Paksaan melalui Kantor Pos atau disampaikan secara langsung di kantor/ditempat Wajib Pajak/ seorang karyawan di Kantor tersebut sesuai sebagaimana ketentuan Keputusan Kepala Direktora Pajak Nomor 04 Tahun 1990;
- Bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat merubah Surat Keputusan Menteri, tetapi dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Penagihan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak hanya merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan yang harus dilaksanakan di lapangan;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala apa yang telah terjadi di persidangan tentang jalannya Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara, dan untuk mempersingkat putusan ini hendaknya hal-hal tersebut dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang bersengketa memohon putusan dalam sengketa ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Paksa Nomor : Print. 315/WPJ.06/KP.0208 yang diterbitkan Tergugat tanggal 15 November 1995;
- bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 "Surat Paksa berkepala kata-kata "Atas Keadilan" serta memuat nama penanggung pajak, keterangan cukup tentang

alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah untuk membayar”

dan dalam ayat 2 nya menyatakan :

“Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sama seperti *grosse* putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada Hakim atasan”

dan dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan :

Sifat Surat Paksa adalah suatu *executoriale titel* yang mempunyai kekuatan yang sama seperti *grosse* Keputusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan. Oleh karena itu Surat Paksa memakai kepala “Atas Nama Keadilan”

Karena itu jelaslah Surat Paksa mempunyai sifat khusus yang merupakan “Parate Eksekusi” sehingga tidak dapat disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara lainnya;

2. bahwa sanggahan terhadap Surat Paksa, baik menurut Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 maupun Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 23 ayat (2) diajukan ke Pengadilan Negeri, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut pihak Penggugat didalam Repliknya pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapannya tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Surat Paksa Nomor : Print.315/WPJ.06/KP.0208/1995 tanggal 5 September 1995 yang disampaikan tanggal 15 November 1995, menurut hemat Majelis memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 butir 3 dimaksud, apabila terjadi sengketa atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memutus dan menyelesaikannya;
- Mengenai Surat Paksa sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengujinya, dari segi prosedural pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara ter-

sebut dan prosedur penyampaian/pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum tetap yang menjadi pokok persoalan di dalam perkara ini, yaitu :

- Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Paksa No. Print.315/WPJ.06/KP.0208/1995 tanggal 5 September 1995 yang disampaikan tanggal 15 November 1995 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Surat Paksa *a quo* diterbitkan atas sejumlah hutang yang harus dibayar oleh Penggugat yang terdiri dari hutang dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang jumlahnya belum pasti. Sehingga menurut Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan Surat Paksa atas jumlah hutang yang belum pasti tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan *a quo* telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan penerbitan Surat Paksa tersebut telah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 menentukan :

"Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Penetapan Pajak Tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa";

ditegaskan lagi sehubungan dengan adanya keberatan, penjelasan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 :

"Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan Pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan surat keberatan tidak menghalangi tindakan penagihan. Ketentuan ini perlu di-

cantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak dengan dalil mengajukan keberatan, untuk tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan negara”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-30, sedangkan Pihak Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan alat bukti T-1 sampai dengan T-16. Dan di persidangan telah didengar saksi-saksi ahli satu orang dari pihak Penggugat dan satu orang dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Paksa No. Print.315/WPJ.06/KP.0208/1995 tanggal 5 September 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam eksepsi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara didalam menguji objek sengketa didalam perkara ini yaitu Surat Paksa, hanyalah dari segi proseduralnya saja, baik prosedur pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara maupun prosedur pelaksanaan/penyampaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa kalau ditelaah objek sengketa dalam perkara ini (Sura Paksa) telah jelas bahwa Penanggung Pajak/Wajib Pajak adalah PT. NATRA RAYA, NPWP. 1.060.105.1.052 alamat Jalan Raya Narogong Km. 19 Cileungsi Bogor, jenis Pajak PPh Pasal 25 Tahun 1992, PPn 1992 dan PPh 1992, jumlah tunggakan seluruhnya Rp. 2.987.354.031,- dan adanya perintah membayar sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959. Yaitu, pajak harus dilunasi dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima Surat Paksa ini, sesudah batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyitaan;

Menimbang, bahwa Surat Paksa *a quo* telah disampaikan oleh Juru sita paksa negara Sdr. ARGILAUS SIMBOLON tanggal 15 November 1995 yang diterima oleh Sdr. VICTOR G. TUMANSENG, Karyawan/Staf pada PT. NATRA RAYA;

Menimbang, bahwa menurut aturan dasarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 Pasal 6 :

Ayat (1) Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak Pribadi, di tempat tinggalnya atau di kantornya;

Ayat (2) penyimpangan dari ketentuan ayat (1), pemberitahuan terhadap :

- a) badan hukum, dilakukan kepada Ketua atau salah seorang anggota pengurus (Direksi) pribadi, atau kepada Ketua atau salah seorang dari Dewan Pengawas (Komisaris) pribadi, di tempat tinggalnya atau di tempat Pengurus (Direksi) atau Dewan Pengawas (Komisaris) tersebut ber-sidang atau berkantor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa pemberitahuan/penyampaian Surat Paksa telah tidak dilakukan sesuai maksud Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 yakni tidak menyampaikan secara langsung kepada Direksi/Pengurus atau Dewan Pengawas (Komisaris) pribadi, melainkan disampaikan kepada salah seorang Staff/karyawan PT. NATRA RAYA, yang seharusnya apabila tidak menjumpai seseorang di tempat tinggalnya atau di tempat sidang, tempat kedudukan atau kantor seperti dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Kepala Daerah Kotapraja/Kabupaten atau pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut yang selanjutnya setelah dibubuhi tanda tangan salinannya dicatat Juru Sita dalam Surat Paksa dan Salinannya (ayat (3));

Sebab dengan penyampaian yang keliru akan mempunyai akibat hukum yang keliru pula misalnya mengenai akibat hukum berupa dilaksanakannya tindakan penagihan dan penyitaan dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima Surat Paksa (Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959);

Menimbang, bahwa karena penyampaian Surat Paksa tersebut menyimpang dari ketentuan yang menyimpang, yaitu disampaikan kepada orang yang tidak berhak hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal ketentuan tersebut bersifat imperatif, maka menurut pendapat Majelis penyampaian tersebut tidaklah sah sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan Surat Paksa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Surat Paksa *a quo* haruslah dinyatakan batal dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 1996 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan SOEDARTO RADYOSUWARNO, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, IIS SUDARYONO, SH. dan MUSTAHDI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 1996 oleh Majelis Hakim SOEDARTO RADYOSUWARNO, SH. sebagai Ketua Majelis, IIS SUDARYONO, SH. dan Ny. MISDJON CHAIDIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh MUHAMMAD ZAKY, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. IIS SUDARYONO, SH.

ttd.

2. NY. MISDJON CHAIDIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

SOEDARTO RADYOSUWARNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MUHAMMAD ZAKY, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Biaya administrasi Kepaniteraan/Panggilan	Rp.	45.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Meterai	Rp.	<u>2.000,-</u>
Jumlah	Rp.	48.000,-

(empat puluh delapan ribu rupiah)